

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Rekho, A., & Yogi, A. (2023). Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh maupun Pemerintah Daerah . pemungutan bagi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten. *JurnalManajemen Publik DanKebijakan Publik*, 5(SEPTEMBER), 2013–2022.
- Albers, B., Shlonsky, A., & Mildon, R. (Ed.). (2020). *Implementation Science* 3.0. Cham: Springer.
- Ana Maria, S. H., Amni Zarkasyi, R., & Retna, H. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. *Journal of Management and Public Policy*, 13(4), 241–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47257>
- Anggela, B., Rosidin, & Adriadi, R. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1), 127–136. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4949>
- Armaiijn, L., Darmayanti, D., Sonia, B., & Rochmat, H. (2024). *Kebijakan Publik dalam Perubahan Paradigma* (Vol. 2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma. (2025). *Kecamatan Air Periukan dalam Angka 2025*. Tais: BPS Kabupaten Seluma.
- Chapman, A., Gaskin, C. J., Beks, H., Wright, C., Marshall, S., Johnston, E. A., Bergin, R. J., Riva, S., Crawford-Williams, F., Short, C. E., Kiss, N., Yoong, S. L., Hart, N. H., Wong Shee, A., Rodi, H., Jongebloed, H., & Ugalde, A. (2026). Implementation strategies for evidence-based healthcare interventions in rural and remote settings: a scoping review. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 66(November 2025), 101732. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2025.101732>
- Cresswell. J. W. (2025). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>

- Darma, P., Pardede, K., Lase, A., Tua, D., Panjaitan, M. R., & Simamora, P. R. T. (2026). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Tata Kelola Administrasi Desa di Kecamatan Namorambe*. 6(3), 233–242.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), PROGRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11745>
- Darmi, T., Mujtahid, I. M., Ichzani, B. A., & Nusantara, B. D. (2022). Analisis pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 89–98. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i1.7507>
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Seluma. (2025). *Data Perumahan dan Permukiman Desa Padang Pelasan Tahun 2025*. Tais: Pemerintah Kabupaten Seluma.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Fachrian, S., & Adriadi, A. (2023). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2540>
- Fullerton, A. H. (2025). Michael HILL & Peter HUPE, Implementing Public Policy (4th ed.). *International Review of Public Policy*, 7(2), 274–276. <https://doi.org/10.4000/14ge9>
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (Edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (Edisi ke-4). Oxford: Oxford University Press.
- Indonesia, R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *peraturan.bpk.go.id*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Kementerian Keuangan. (2024). PMK Nomor 108 Tahun 2024. *Kemenkeu*, 1–800. <https://drive.google.com/file/d/1cP1GI9W1G-e0LOhdMrqA2Ahvfs1bCW6l/view>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B. A., & Huberman, M. (2025). *Qualitative Data Analysis* (third). SAGE.
- Muhammad Fathrisal Hasbullah, Anwar Alaydrus, & Melati Dama. (2022). Analisis Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam Pembangunan Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 87–93. <https://doi.org/10.30872/jip.v10i3.984>
- Pemerintah Desa Padang Pelasan. (2025). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Pelasan Tahun Anggaran 2025*. Padang Pelasan: Pemerintah Desa Padang Pelasan.
- Pemerintah Desa Padang Pelasan. (2025). *Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025*. Padang Pelasan: Pemerintah Desa Padang Pelasan.
- Pemerintah Desa Padang Pelasan. (2025). *Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025*. Padang Pelasan: Pemerintah Desa Padang Pelasan.
- Pemerintah Desa Padang Pelasan. (2025). *Profil Desa Padang Pelasan Tahun 2025*. Padang Pelasan: Pemerintah Desa Padang Pelasan.
- Pemerintah Desa Padang Pelasan. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Desa Padang Pelasan Tahun Anggaran 2025*. Padang Pelasan: Pemerintah Desa Padang Pelasan.
- Pemerintah Desa Padang Pelasan. (2021–2025). *Laporan Penggunaan Dana Desa Padang Pelasan Tahun 2021–2025*. Padang Pelasan: Pemerintah Desa Padang Pelasan.
- Pemerintah Kabupaten Seluma. (2025). *Peraturan Bupati Seluma Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025*.
- Ratih Rahayu, Faizal Anwar, Kasman, & Titi Darmi. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1), 117–129. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4963>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun*

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Safitri, I. D., Adriadi, R., & Darmi, T. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Kerano Kuncoro Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(1), 58–75. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v4i1.1757>

Sugiyono. (2023). Penelitian Kualitatif. In *Journal Of Social Science Research*.

L A M P I R A N



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian

Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

A. Identitas Informan

Nama Informan :
Jabatan/Status :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :

B. Pengantar Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan sumur bor. Data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan akademik dalam penyusunan skripsi.

Pertanyaan disusun berdasarkan fokus penelitian yang menggunakan teori Updated Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) dari Damschroder dkk. (2022), dengan indikator penelitian meliputi kejelasan program, dukungan dan kebutuhan masyarakat, kapasitas organisasi pelaksana, komitmen aktor pelaksana, serta proses pelaksanaan, pengawasan, dan umpan balik.

C. Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
1	Kejelasan Program	Apa dasar pemerintah desa memilih pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan sumur bor sebagai program Dana Desa Tahun 2025?
2	Kejelasan Program	Apa tujuan utama dari pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan sumur bor tersebut?
3	Kejelasan Program	Bagaimana proses penentuan lokasi pembangunan jalan lingkungan dan titik sumur bor?
4	Kejelasan Program	Apakah program pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Padang Pelasan?
5	Kejelasan Program	Apa manfaat yang diharapkan dari pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor bagi masyarakat?
6	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap jalan lingkungan dan air bersih sebelum program ini dilaksanakan?
7	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah atau proses pengusulan program pembangunan?
8	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor?
9	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Apakah ada masyarakat yang memberikan usulan, kritik, atau keberatan terhadap program tersebut?
10	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Bagaimana pemerintah desa menanggapi aspirasi atau masukan dari masyarakat?
11	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah anggaran Dana Desa untuk pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor sudah mencukupi?
12	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut?
13	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Bagaimana pembagian tugas antara kepala desa, perangkat desa, TPK, BPD, dan kepala dusun?
14	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah pemerintah desa memiliki sumber daya manusia dan kemampuan teknis yang cukup untuk melaksanakan program?
15	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apa saja dokumen yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, seperti APBDes, RKPDDes, atau berita acara musyawarah desa?
16	Komitmen Aktor Pelaksana	Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor?
17	Komitmen Aktor Pelaksana	Bagaimana tanggung jawab TPK dalam menjalankan kegiatan pembangunan?
18	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah pelaksana program memahami aturan penggunaan Dana Desa?
19	Komitmen Aktor Pelaksana	Bagaimana sikap pelaksana ketika menghadapi kendala di lapangan?
20	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah pelaksanaan program sudah dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat?
21	Proses Pelaksanaan,	Bagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan jalan

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
	Pengawasan, dan Umpan Balik	lingkungan dan sumur bor dari awal sampai selesai?
22	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes?
23	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Bagaimana bentuk koordinasi antara pemerintah desa, TPK, BPD, kepala dusun, dan masyarakat?
24	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan?
25	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan Dana Desa?
26	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah masyarakat diberikan informasi mengenai anggaran dan perkembangan pembangunan?
27	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah ada evaluasi setelah pembangunan selesai dilaksanakan?
28	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Bagaimana pemerintah desa menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat setelah program berjalan?
29	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor?
30	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini sudah berhasil? Mengapa?

D. Pedoman Wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
1	Kejelasan Program	Bagaimana pandangan BPD terhadap program pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor di Desa Padang Pelasan?
2	Kejelasan Program	Apakah program tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
3	Kejelasan Program	Apakah BPD dilibatkan dalam pembahasan dan penetapan program pembangunan tersebut?
4	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Apakah masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan jalan lingkungan dan air bersih?
5	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Bagaimana BPD menampung aspirasi masyarakat terkait program tersebut?
6	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan sumur bor?

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
7	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Menurut BPD, apakah pemerintah desa memiliki kesiapan dalam melaksanakan program tersebut?
8	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah pembagian tugas pelaksana pembangunan sudah jelas?
9	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah penggunaan anggaran pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan?
10	Komitmen Aktor Pelaksana	Bagaimana penilaian BPD terhadap komitmen pemerintah desa dan TPK dalam melaksanakan pembangunan?
11	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah pelaksana program bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya?
12	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah ada kendala yang terlihat dalam pelaksanaan pembangunan?
13	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Bagaimana bentuk pengawasan BPD terhadap pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor?
14	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah pemerintah desa menyampaikan informasi atau laporan kepada BPD?
15	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan atau kritik?
16	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apa saran BPD agar pelaksanaan Dana Desa ke depan lebih baik?

E. Pedoman Wawancara untuk Kepala Dusun

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
1	Kejelasan Program	Apakah Bapak/Ibu mengetahui program pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor di Desa Padang Pelasan?
2	Kejelasan Program	Bagaimana informasi mengenai program tersebut disampaikan kepada kepala dusun?
3	Kejelasan Program	Apakah lokasi pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan dusun?
4	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Apa kebutuhan utama masyarakat di dusun terkait jalan lingkungan dan air bersih?
5	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Apakah masyarakat dusun ikut menyampaikan usulan dalam musyawarah desa?
6	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Bagaimana respons warga terhadap program pembangunan tersebut?
7	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah pelaksanaan pembangunan di dusun berjalan lancar?
8	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah tenaga kerja, alat, dan bahan pembangunan tersedia dengan baik?
9	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah ada kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
	Pelaksana	di dusun?
10	Komitmen Aktor Pelaksana	Bagaimana keterlibatan kepala dusun dalam membantu pelaksanaan program?
11	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah pelaksana pembangunan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab?
12	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah masyarakat ikut membantu atau mengawasi pembangunan?
13	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun?
14	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah masyarakat mengetahui anggaran dan tujuan program?
15	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah masyarakat pernah menyampaikan keluhan atau masukan?
16	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apa manfaat yang sudah atau akan dirasakan masyarakat dari pembangunan tersebut?

F. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Penerima Manfaat

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
1	Kejelasan Program	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan sumur bor di Desa Padang Pelasan?
2	Kejelasan Program	Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang program tersebut?
3	Kejelasan Program	Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan program tersebut sudah jelas bagi masyarakat?
4	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Apakah pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor memang dibutuhkan oleh masyarakat?
5	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Sebelum program ini, apa kendala yang dirasakan masyarakat terkait jalan lingkungan atau air bersih?
6	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Apakah Bapak/Ibu pernah ikut dalam musyawarah desa atau menyampaikan usulan terkait program ini?
7	Dukungan dan Kebutuhan Masyarakat	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembangunan tersebut?
8	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa mampu melaksanakan pembangunan tersebut dengan baik?
9	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah pelaksanaan pembangunan terlihat tertib dan sesuai rencana?
10	Kapasitas Organisasi Pelaksana	Apakah masyarakat mengetahui siapa pelaksana kegiatan pembangunan?

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara
11	Komitmen Aktor Pelaksana	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kesungguhan pemerintah desa dalam melaksanakan program?
12	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah pelaksana pembangunan terbuka terhadap pertanyaan atau masukan masyarakat?
13	Komitmen Aktor Pelaksana	Apakah pemerintah desa terlihat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan?
14	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah masyarakat diberi informasi mengenai anggaran atau proses pembangunan?
15	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah ada papan informasi kegiatan di lokasi pembangunan?
16	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan?
17	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah ada keluhan masyarakat selama pembangunan berlangsung?
18	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Setelah pembangunan selesai, apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan?
19	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apakah pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
20	Proses Pelaksanaan, Pengawasan, dan Umpan Balik	Apa saran Bapak/Ibu untuk pelaksanaan Dana Desa ke depan?

G. Pedoman Observasi Lapangan

No	Aspek yang Diamati	Keterangan
1	Lokasi jalan lingkungan rabat beton	Kondisi fisik, panjang, lebar, dan akses masyarakat.
2	Lokasi sumur bor	Jumlah titik, lokasi dusun, kondisi fisik, dan pemanfaatan warga.
3	Papan informasi kegiatan	Ada atau tidak ada, isi informasi, dan keterbacaan.
4	Kondisi lingkungan sekitar pembangunan	Akses rumah warga, jalan, sumber air, dan kondisi permukiman.
5	Pemanfaatan oleh masyarakat	Digunakan atau belum digunakan, pengguna utama, dan intensitas pemanfaatan.
6	Bukti partisipasi masyarakat	Gotong royong, pengawasan warga, atau kehadiran masyarakat dalam kegiatan.
7	Kesesuaian dengan informasi wawancara	Kesesuaian kondisi lapangan dengan keterangan informan.

H. Pedoman Dokumentasi

1. APBDes Tahun 2025.
2. RKPDes Tahun 2025.
3. Berita acara musyawarah desa.
4. Daftar hadir musyawarah desa.
5. Dokumen perencanaan kegiatan jalan lingkungan dan sumur bor.
6. Rencana anggaran biaya kegiatan.
7. Foto kegiatan pembangunan.
8. Papan informasi kegiatan.
9. Laporan pelaksanaan kegiatan.
10. Laporan pertanggungjawaban Dana Desa.
11. Profil Desa Padang Pelasan.
12. Data penerima manfaat atau lokasi pembangunan.
13. Dokumentasi hasil observasi lapangan.

I. Pertanyaan Penutup untuk Semua Informan

1. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendukung keberhasilan pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor?
2. Apa kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut?
3. Apa saran Bapak/Ibu agar penggunaan Dana Desa di Desa Padang Pelasan lebih baik ke depan?
4. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pelaksanaan Dana Desa dan pembangunan infrastruktur dasar di desa ini?

LAMPIRAN II

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 0.5, Sido Mulyo, Gading Campaka, Kota Bengkulu, 38221 ● (0736) 22765
● fkip.umb.ac.id ● (0736) 26181
● fkipol@umb.ac.id

Nomor : 318-SI/DF.7/IL3.AU/C/2026
Lamp : 1 berkas
Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 1 Juli 2026

Kepada Yth : Kepala Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma
di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami menghaturkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : JONI HENDRA GUNAWAN
NPM : 2463201056
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Padang Pelasan Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma"**, penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 2 Juli 2026 – 2 Agustus 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

a/n Dekan,
Wakil Dekan I



Rosdila, M. Si
NIP. 19820112 200904 1 080



umb.ac.id



rumas@umb.ac.id



0822-3546-1991



um Bengkulu



um Bengkulu



um Bengkulu



um Bengkulu



umb tv



Radio Jastrah FM 104,3 MHz

 Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III

SURAT BALASAN DARI DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA KECAMATAN AIR PERIUKAN DESA PADANG PELASAN <i>Jl. Lintas Bengkulu Tais KM. 37 Desa Padang Pelasan</i>
Nomor : 129/SK/2004/VII/2026	Padang Pelasan, 02 Juli 2026
Lamp : -	
Perihal : Izin Penelitian	
Kepada Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muammadiyah Bengkulu di - <u>Bengkulu</u>	
Dengan hormat, Sehubungan dengan surat saudara nomor: 318-SI/DF.7/IL.3.AU/C/2026 tanggal 1 Juli 2026 perihal izin penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nama : Joni Hendra Gunawan NPM : 2463201056 Program Studi : Administrasi Publik Untuk itu kami Pemerintah Desa Padang Pelasan menyetujui/memberikan izin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Padang Pelasan mulai dari tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 2 Agustus 2026. Izin penelitian ini diberikan untuk menunjang penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dengan judul penelitian <i>"Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma"</i>. Pemerintah Desa menegaskan dan berharap segala bentuk dokumen dan informasi yang dibutuhkan nantinya adalah murni untuk bahan penelitian bukan untuk kepentingan lain diluar penelitian ini. Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Kepala Desa,  <u>Sarahan Putra</u>	

LAMPIRAN IV

Dokumentasi Penelitian



